



PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

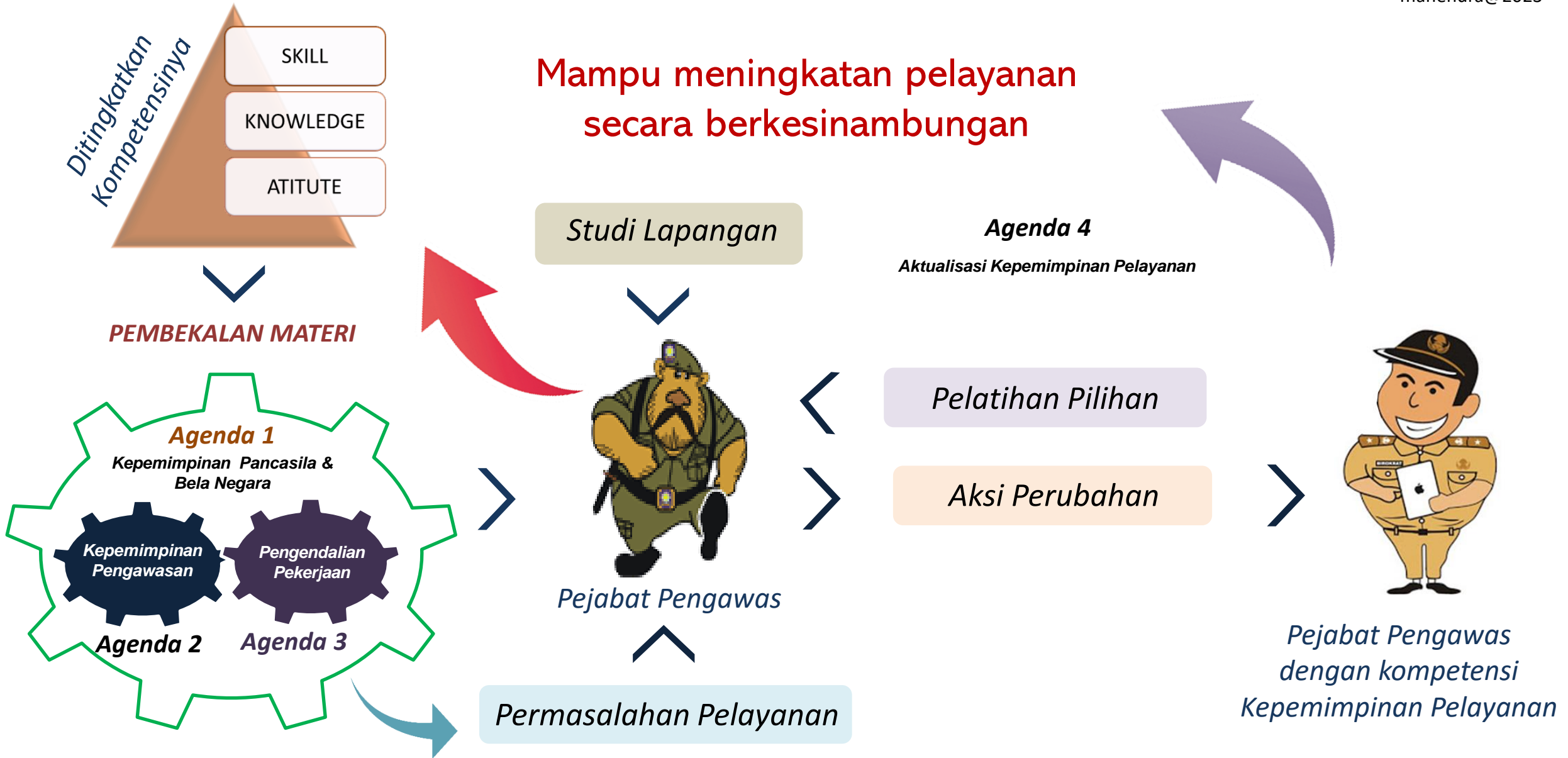
TAHUN 2023

AGENDA 3

Perencanaan dan Penyusunan RKA
Kegiatan Pelayanan Publik

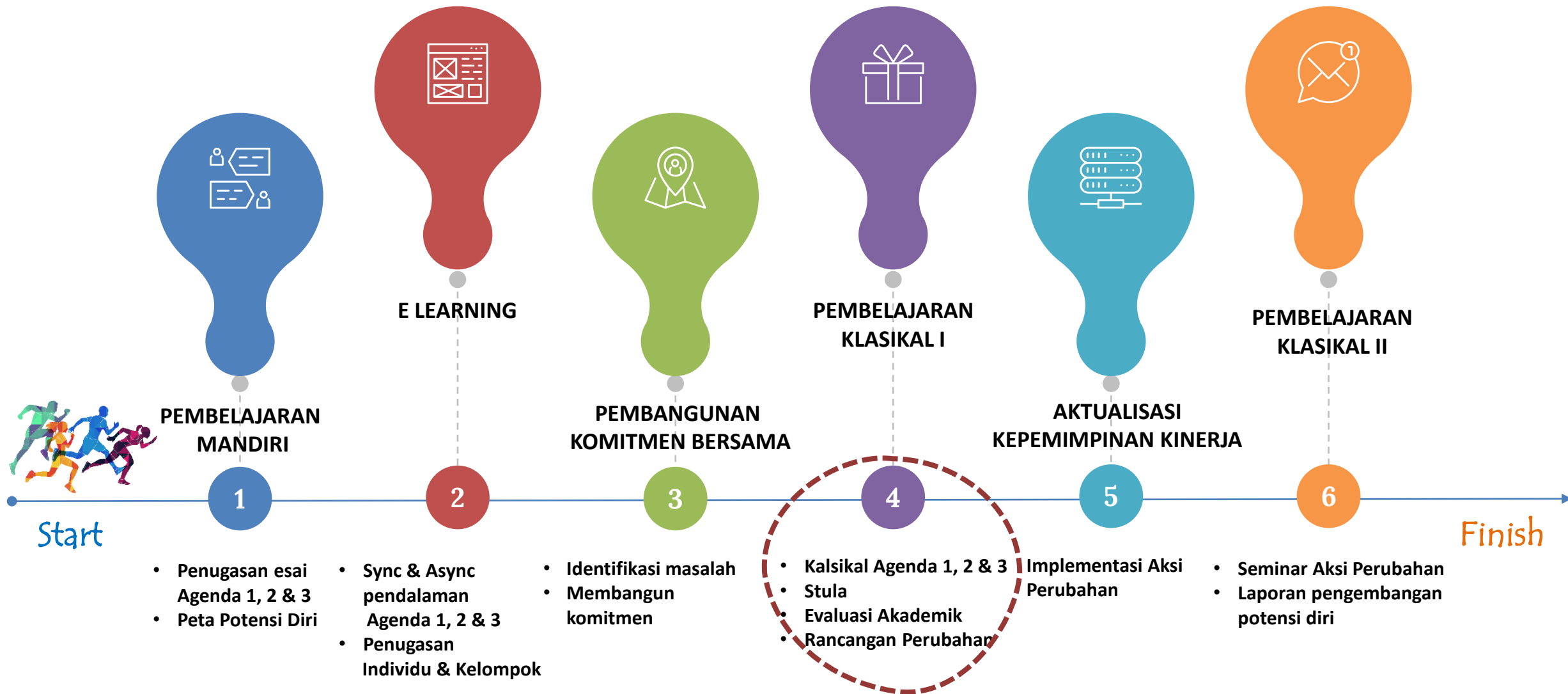


KONSEPSI PEMBELAJARAN PKP



LEARNING JOURNEY

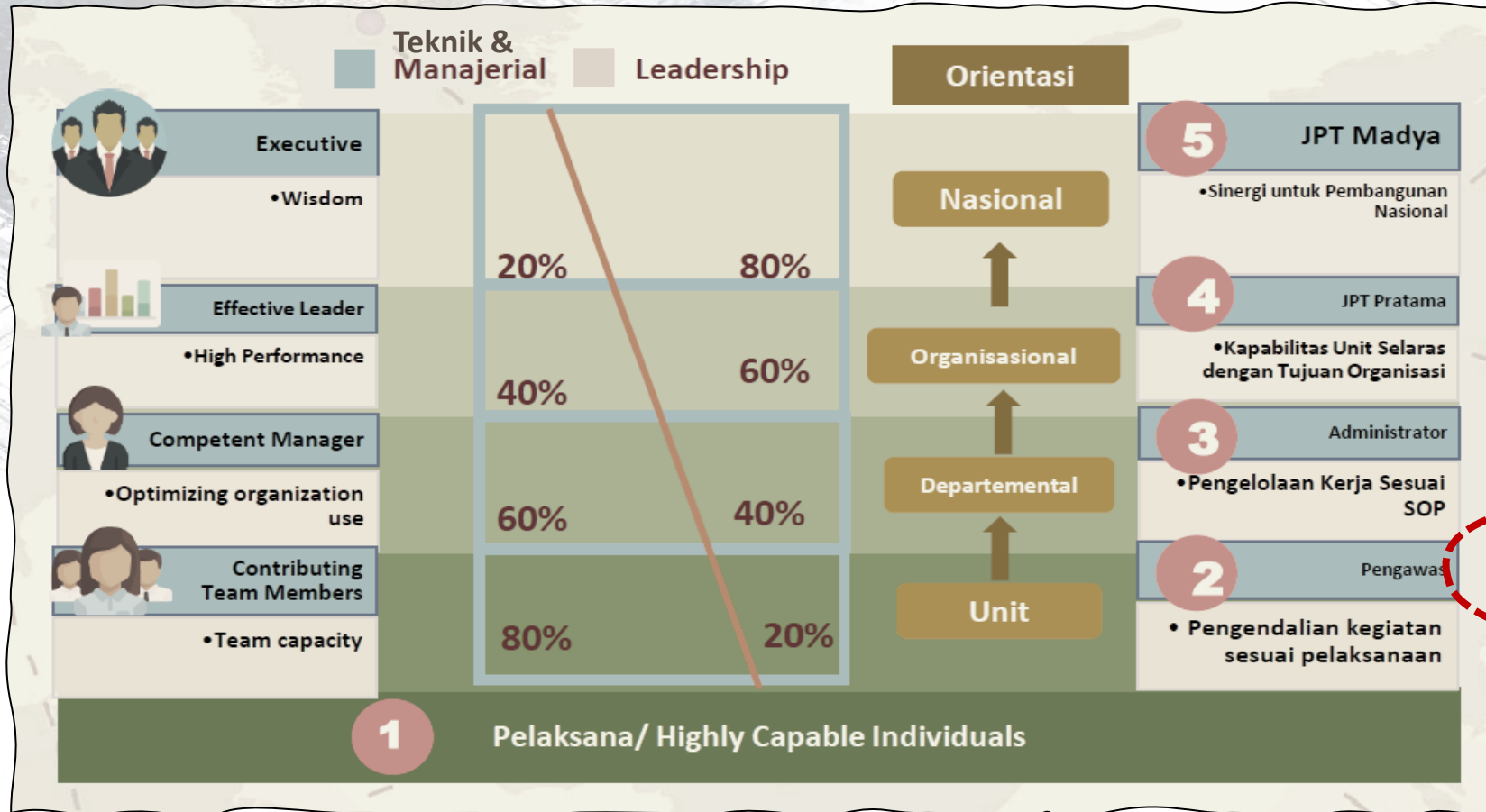
KEPKALAN NO. 1/K.1/PDP.07/2023



Dasar Hukum

- **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**
Nomor: 1/K.1/PDP.07/2023 tentang KURIKULUM PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN
- **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**
Nomor: 2/K.1/PDP.07/2023 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN
- **PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**
Nomor 5 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN
sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Nomor 6 Tahun 2022
- **PERATURAN PEMERINTAH**
Nomor 11 Tahun 2017 tentang MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH 17 Tahun 2020
- **UNDANG UNDANG**
Nomor 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA
- **UNDANG UNDANG**
Nomor 25 Tahun 2009 tentang PELAYANAN PUBLIK

GRAND DESIGN PELATIHAN KEPEMIMPINAN



PKN I,
Kepemimpinan Kolaborasi

PKN 2,
Kepemimpinan Strategi

PKA,
Kepemimpinan Kinerja

PKP,
Kepemimpinan Pelayanan

LATSAR,
Profesionalisme PNS

Komunikasi Pelayanan Publik

Menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan tugas & fungsi jabatan untuk pengendalian pekerjaan menuju pelayanan publik yang optimal

Pelayanan Publik Digital

Menjelaskan Konsep dan Praktik Pelayanan Publik Digital

Penyusunan RKA Pelayanan Publik

Mengidentifikasi inisiatif dalam rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsi serta Menyusun rencana kerja anggaran

Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik

Merencanakan Pelayanan Publik



Pengendalian Pekerjaan

Manajemen Mutu

Memahami manajemen mutu dan menerapkan Teknik-Teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas pejabat pengawas di instansinya.

Manajemen Pengawasan

Memahami kosep manajemen pengawasan dan substansi pengawasam dalam kebijakan SPIP

Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan

Melaksanakan dan menganalisis hasil monitoring pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang /jasa.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

BPMI 102021

SE MENPAN dan RB No.20/2021

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia serta untuk melaksanakan nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara. Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core values* “**ASN BerAKHLAK**” dan *employer branding* ASN “**Bangga Melayani Bangsa**”.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



- **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KEBUTUHAN MASYARAKAT

1 PRIMER

Makan, pakaian, tempat tinggal...



Kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup

2 SEKUNDER

Transportasi, komunikasi, olah raga...



Kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda dan tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup individu

3 TERSIER

Wisata, hiburan, kendaraan...

SEKTOR PRIVAT VS SEKTOR PUBLIK

PRIVAT

- Dilakukan oleh organisasi swasta yang bertujuan untuk memasarkan produknya.
- Dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan implementasi bertanggung jawab kepada pemegang saham.
- Berorientasi kepada keuntungan/profit bagi perusahaan.
- Sumber dana dari modal sendiri dengan pertanggung jawaban tertutup.
- Penjualan produk dilakukan dengan mekanisme harga.

PUBLIK

- Dilakukan oleh organisasi pemerintah untuk menyediakan layanan untuk masyarakat.
- Dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan implementasi bertanggung jawab kepada berbagai pihak Politisi, Masyarakat, Swasta, LSM, NGO.
- Berorientasi kepada manfaat/benefit bagi masyarakat.
- Sumber dana dari APBN/APBD dengan pertanggung jawaban terbuka.
- Penggunaan layanan dilakukan dengan mekanisme tarif.

BARANG PRIVAT DAN BARANG PUBLIK

BARANG PRIVAT → Barang yang dihasilkan dengan alokasi sumberdaya private dan tidak dapat diperoleh tanpa pengorbanan

BARANG PUBLIK → Barang yang dihasilkan tanpa alokasi sumber daya dan dapat diperoleh tanpa pengorbanan

PEMANFAATAN DAN KEPEMILIKAN BARANG

EKSKLUDABILITAS > Pemanfaatan

		TINGGI	RENDAH
RIVALITAS > Kepemilikan	TINGGI	<p>PRIVAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumah • Kendaraan • Pakaian • Makanan <p><i>Masyarakat</i></p>	<p>SEMI PUBLIK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber air tanah • Halaman rumah
	RENDAH	<p>SEMI PRIVAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalan Tol • Kendaraan umum • Rumah Sakit • Sekolah • Stasiun, Pelabuhan n Bandara 	<p>PUBLIK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka publik • Pedestrian • Jalan umum • Penerangan umum <p><i>Pemerintah</i></p>

PENGERTIAN PELAYAN PUBLIK

Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik.....?

UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik

JENIS PELAYANAN PUBLIK

- **Pelayanan Barang**

→ Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, seperti jalan, ruang terbuka, gedung olah raga, saluran dll

- **Pelayanan Administratif**

→ Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, seperti akte, peizinan dll

- **Pelayanan Jasa**

→ Pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dll

- **Pelayanan Regulatif**

→ Pelayanan yang menghasilkan produk peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, seperti penertiban kaki lima, perda larangan merokok dll

PELAYANAN PUBLIK

Ruang Lingkup

1. Barang publik (pengadaan dan penyaluran barang publik)
2. Administratif (pelayanan administrasi)
3. Jasa publik (penyediaan jasa publik)
4. Regulatif (pelayanan peraturan)

Penyelenggara

1. Instansi Penyelenggara Negara
2. Korporasi: BUMN/BUMD
3. Lembaga Independen
4. Swasta/Organisasi Masyarakat yang melaksanakan misi Negara karena UU

Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

UU 25/2009 ntang Pelayanan Publik

- Kepentingan umum;
- Kepastian hukum;
- Kesamaan hak;
- Keseimbangan hak dan kewajiban;
- Keprofesionalan;
- Partisipatif;
- Persamaan perlakuan;
- Keterbukaan;
- Akuntabilitas;
- Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- Ketepatan waktu, dan
- Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan

PERINSIP PELAYANAN PUBLIK

SEDERHANA

Mudah, cepat dan tidak berbelit – belit,

ADIL & MERATA

Cakupan pelayanan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan perlakuan yang adil

AMAN

Dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum

EFISIEN

Persyaratan dibatasi pada hal yang berkaitan langsung dengan keperluan pelayanan

JELAS DAN TERBUKA

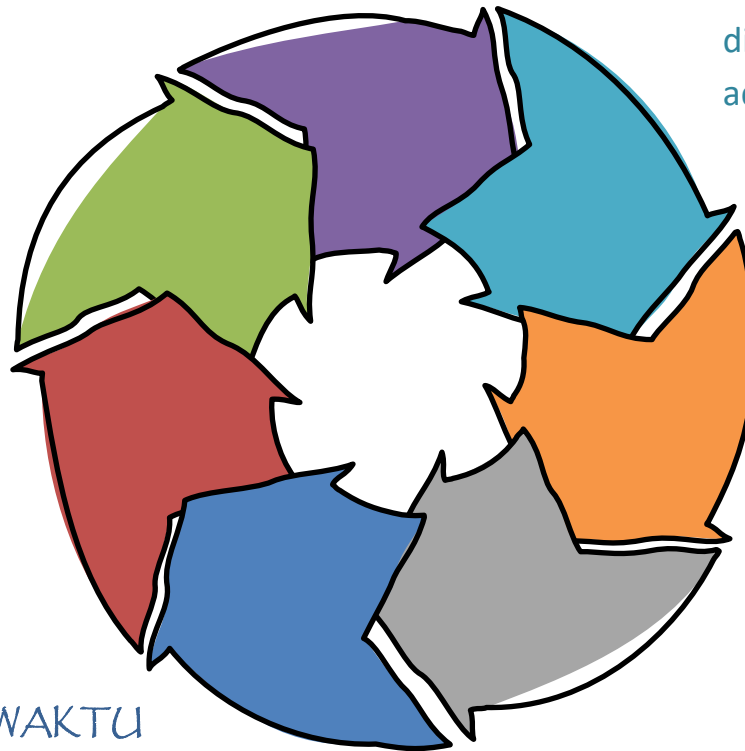
Informasi tentang prosedur, persyaratan, penanggung jawab, pembayaran, waktu penyelesaian, hak dan kewajiban

EKONOMIS

Biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan biaya operasional dan kemampuan masyarakat membayar

TEPAT WAKTU

Pelayanan dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan



PERSEPSI TERHADAP PELAYANAN



KERANGKA PIKIR

Pelayanan Publik
Yang lambat, rumit,
mahal, sulit, buruk,
tidak efektif/efisien,
tidak transparan dan
tidak merata



Pelayanan Publik
Yang cepat, mudah,
murah, baik,
efektif/efisien,
transparan dan
merata

ANALISIS AKAR PERMASALAHAN

PELAYANAN PUBLIK

TATA KELOLA

- PERATURAN
- STANDAR PELAYANAN
- SOP
- MEKANISME

➤ Menyusun SOP Pelayanan Perizinan

SUMBER DAYA MANUSIA

- KUALITAS
- KUANTITAS

➤ Penggunaan tenaga non PNS

ANGGARAN

- OPERASIONAL
- PEMELIHARAAN

➤ Pemberian PSO Transjak, MRT dan LRT

KELEMBAGAAN

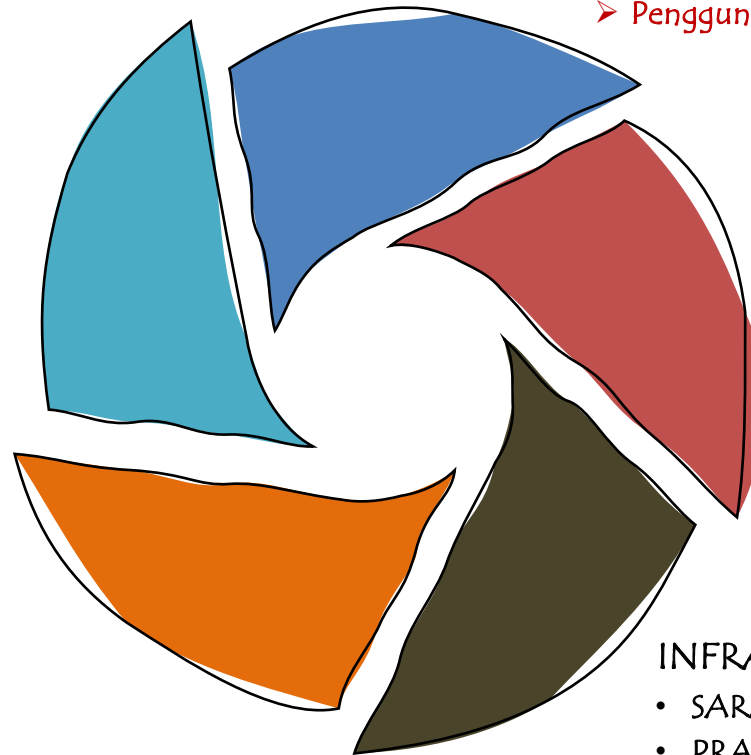
- REGULATOR
- OPERATOR

➤ Pembentukan BLUD

INFRASTRUKTUR

- SARANA
- PRASARANA

➤ Kerjasama pembangunan dengan badan usaha



KESENJANGAN PELAYANAN



Tidak optimal
→ *Optimalisasi*

Lambat
→ *Akselerasi*

Business as usual
→ *Reformasi*



- 1. WA
- 2. Web
- 3. Android
- 4. Lainnya

Sistem pendaftaran manual yang kurang efektif



- 1. Pendaftaran
- 2. Jadwal dokter
- 3. Laboratorium
- 4. Apotek



Mekanisme pendaftaran kurang optimal

SOLUSI

PENDAFTARAN ONLINE Berbasis Android

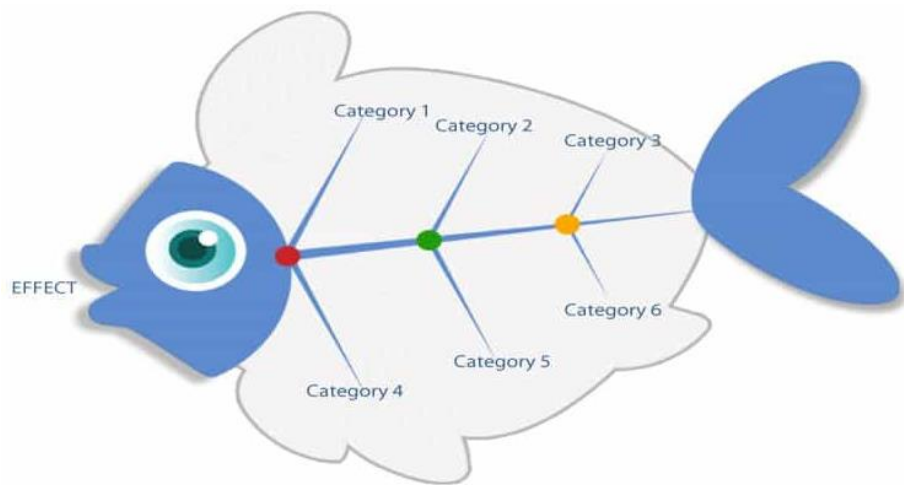


Pelayanan Prima Puskesmas



Ketidakpercayaan masyarakat terhadap Puskesmas

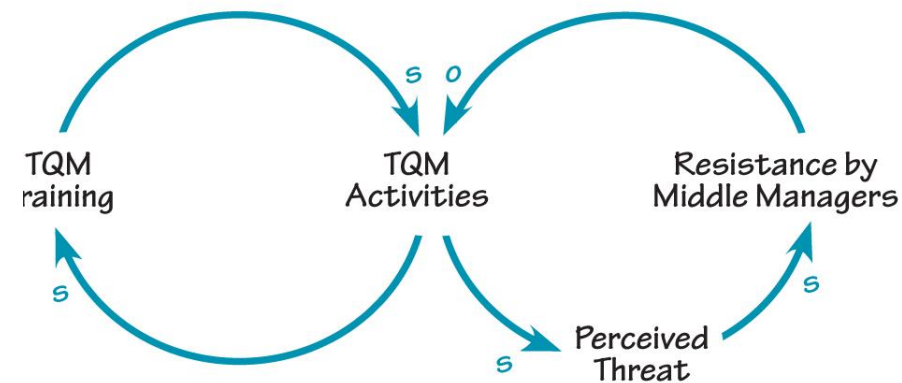
Fishbone



Tree Diagram



Causal Loop



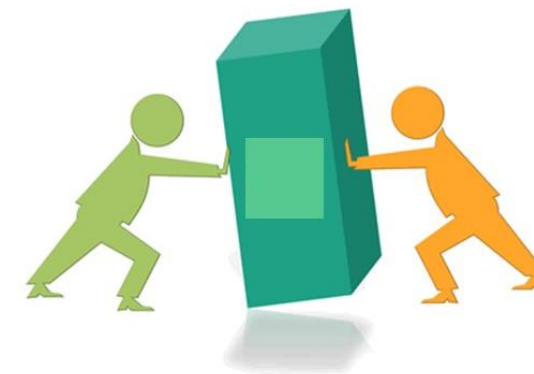
Cost and Benefit Analysis



SWOT

	Positive	Negative
Internal	S	W
External	O	T

Force Field Analysis



Identifikasi Permasalahan Pelayanan Publik



DAERAH OTONOM

(UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah)

1. Urusan Wajib (24)

➤ Pelayanan Dasar (6)

- Pendidikan
- Kesehatan
- PU dan TR
- Perkim
- Trantib, Linmas
- Sosial

➤ Non Pelayanan Dasar (18)

- Naker
- Pemberdayaan PA
- Pangan
- Pertanahan
- LH
- Admindakapil
- Pemberdayaan masy desa
- Dalduk & KB
- Perhubungan
- Kominfo
- KUKM
- Penanaman Modal
- Kepemudaan & OR
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Arsip

2. Urusan Pilihan (8)

- Kelautan & perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan
- ESDM
- Perdagangan
- Perindustrian
- Pariwisata

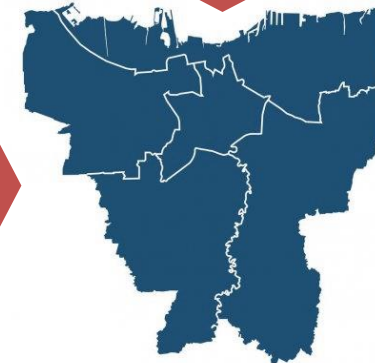
IBU KOTA NKRI

(UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI)

1. TR, SDA dan LH
2. Kependudukan dan Kim
3. Transportasi
4. Indag
5. Pariwisata

APBN

APBD
& APBN



BerAKHLAK

orientasi Pelayanan • kuantabel • kompeten
Harmonis •oyal •daptif •olaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

mahendra@2023



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan / Kuntabel / Kompeten
Harmonis / Loyal / Adaptif / Kolaboratif



**bangga
melayani
bangsa**

mahendra@2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis •oyal •aptif •olaboratif



PUSKESMAS
KECAMATAN KOJA
JAKARTA UTARA



**bangga
melayani
bangsa**

mahendra@2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

mahendra@2023

PEMAHAMAN PERENCANAAN

APA YANG DIMAKSUD DENGAN
PERENCANAAN.....?



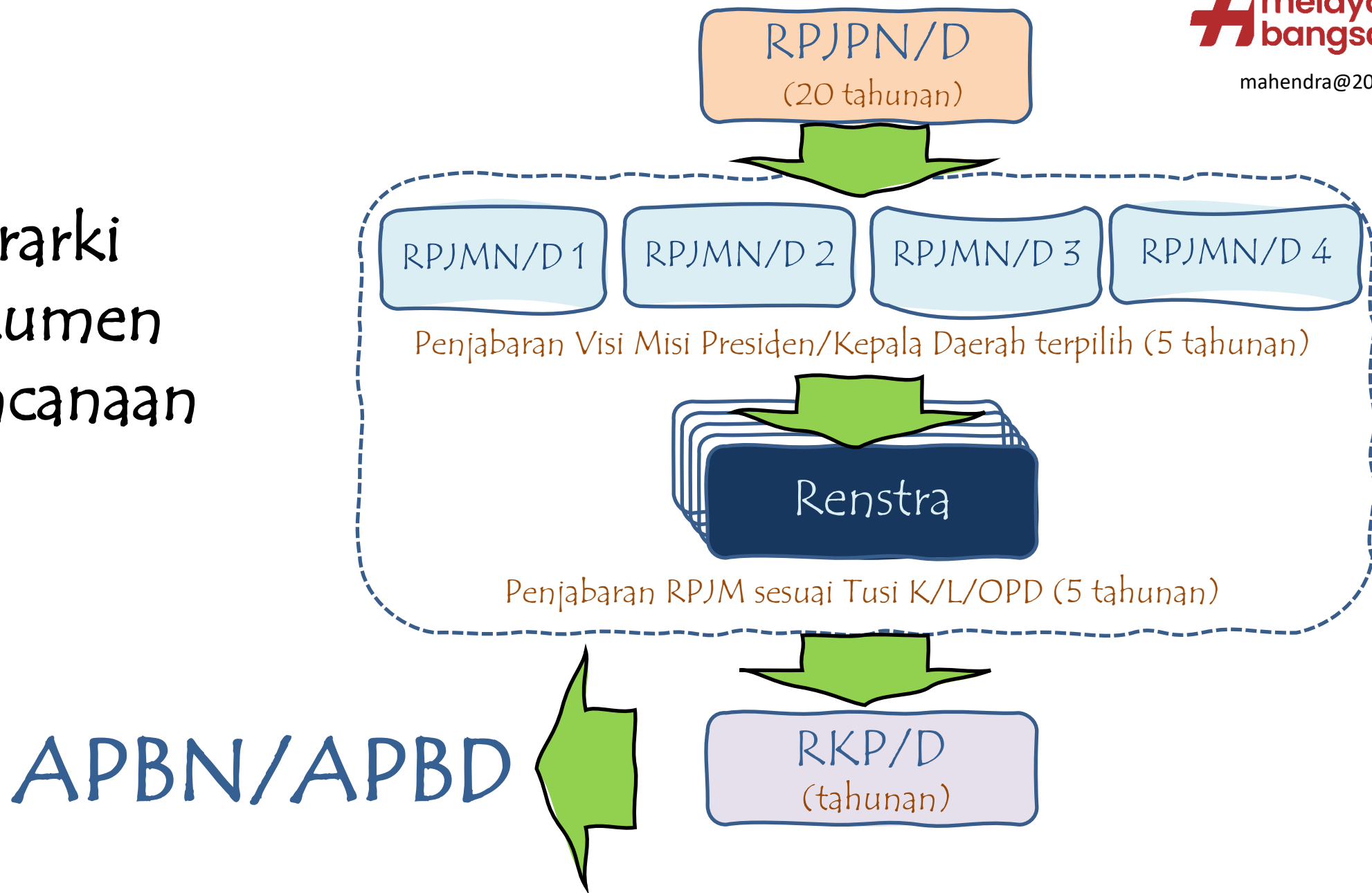
Suatu **proses** untuk menentukan **tindakan masa depan** yang tepat, melalui **urutan pilihan**, dengan memperhitungkan **sumber daya** yang tersedia

PERENCANAAN

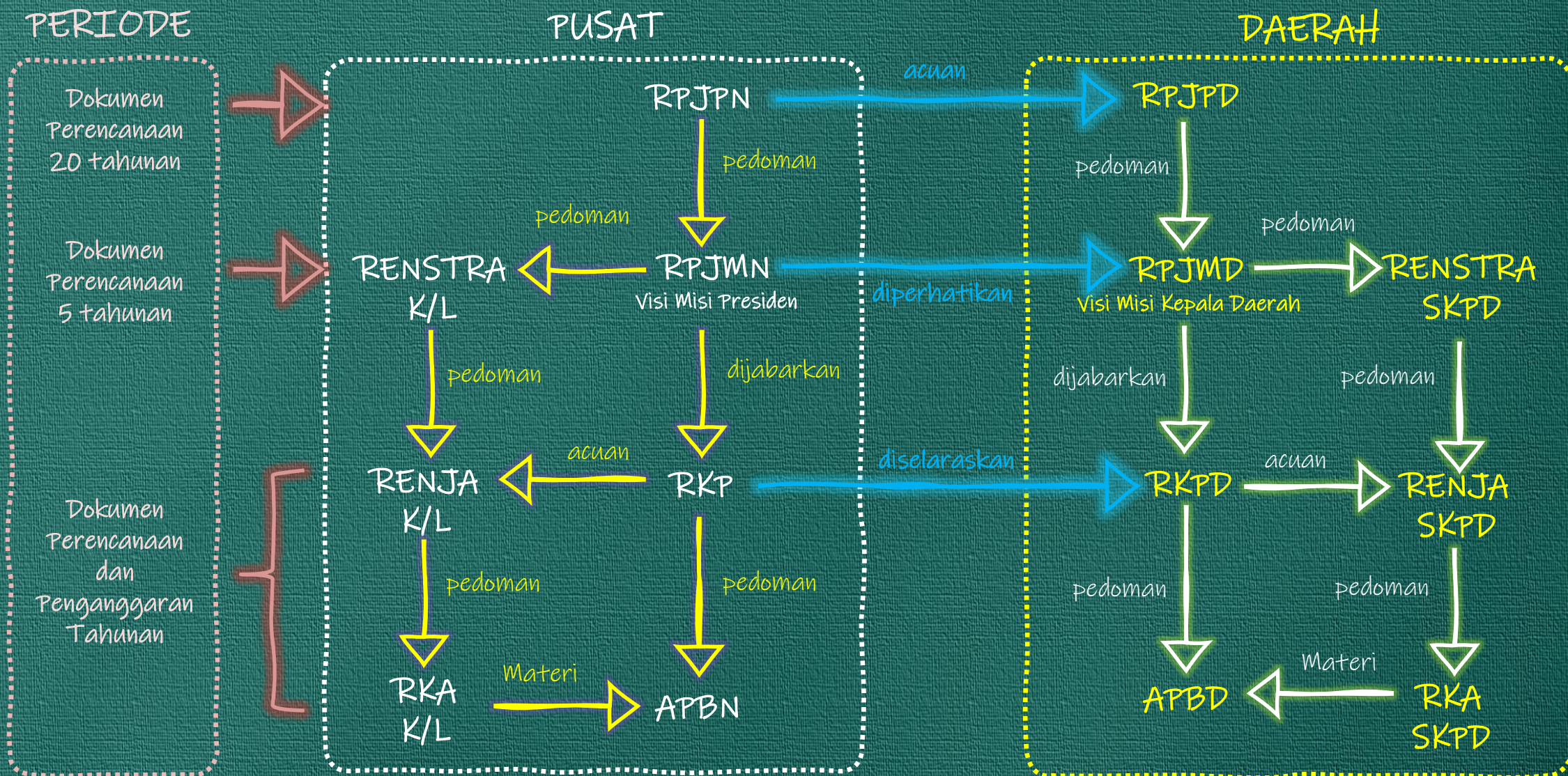
UU No. 25 Tahun 2004



Hirarki Dokumen Perencanaan



Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



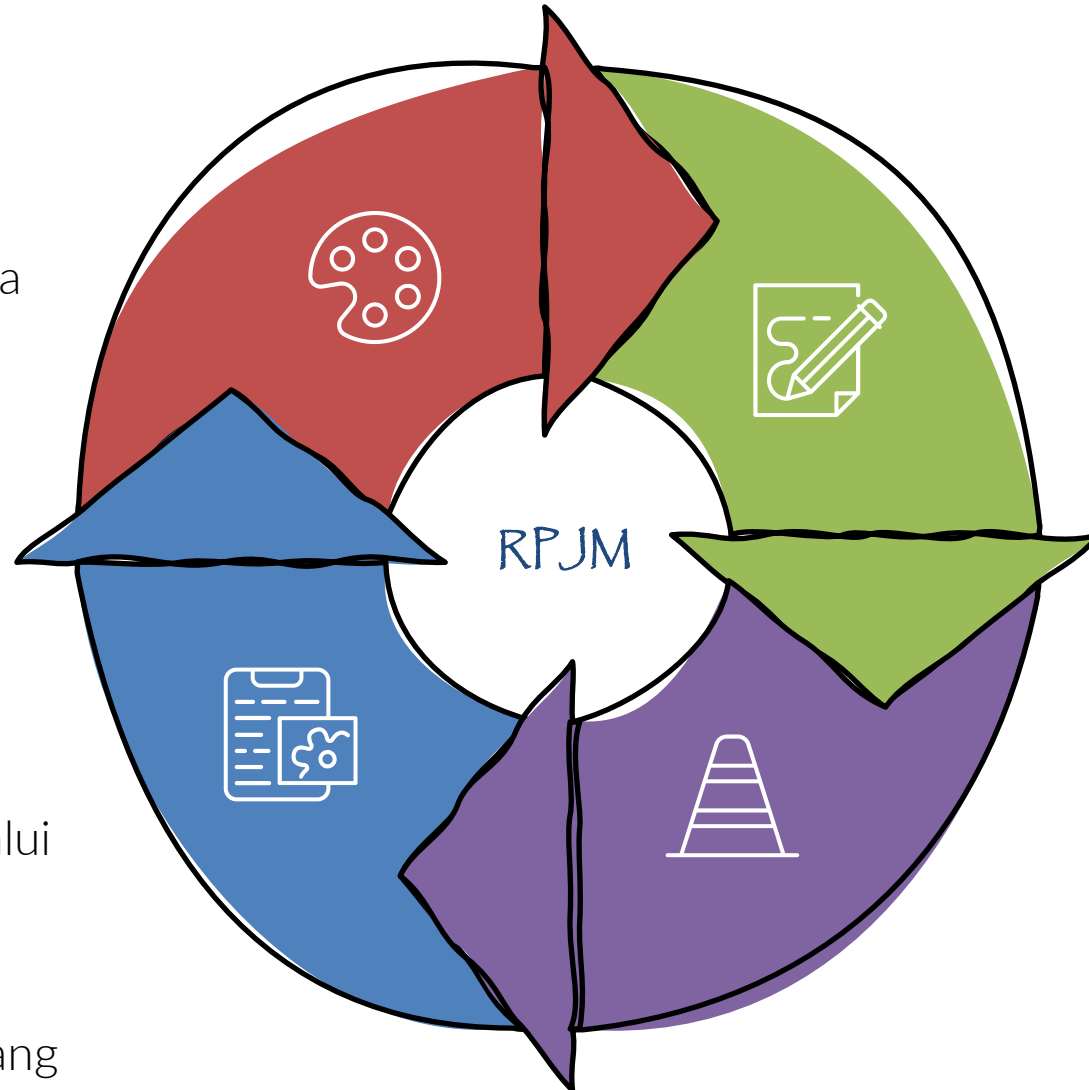
PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN PENYUSUNAN RPJM

POLITIS

KETERLIBATAN DPR/D
Pembahasan RUU/Raperda
RPJMN/D dengan DPR/D

BOTTOM UP/ TOP DOWN

- MASYARAKAT
Penjaringan aspirasi melalui
forum konsultasi publik
- PEMERINTAH
Antisipasi isu aktual dan
kebijakan yang berkembang



TEKNOKRATIS

ILMIAH
Pengkajian seluruh dokumen
yang menjadi pedoman
penyusunan (*Evaluasi rencana
sebelumnya, Rancangan
Renstra, RPJP, RTRW, RRPJP,
RPJM*).

PARTISIPATIF

PELIBATAN
STAKEHOLDER
Pelaksanaan Musrenbang
yang melibatkan seluruh
pemangku kepentingan
(*Daerah sekitar, K/L,
Asosiasi Profesi, Pakar,
Akademisi, LSM, NGO dll*).

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

UU 25/2004

NASIONAL

Merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.

DAERAH

Visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

UU 25/2004

NASIONAL

Merupakan penjabaran dari **visi, misi, dan program Presiden** serta berpedoman pada **RPJP Nasional**, yang memuat

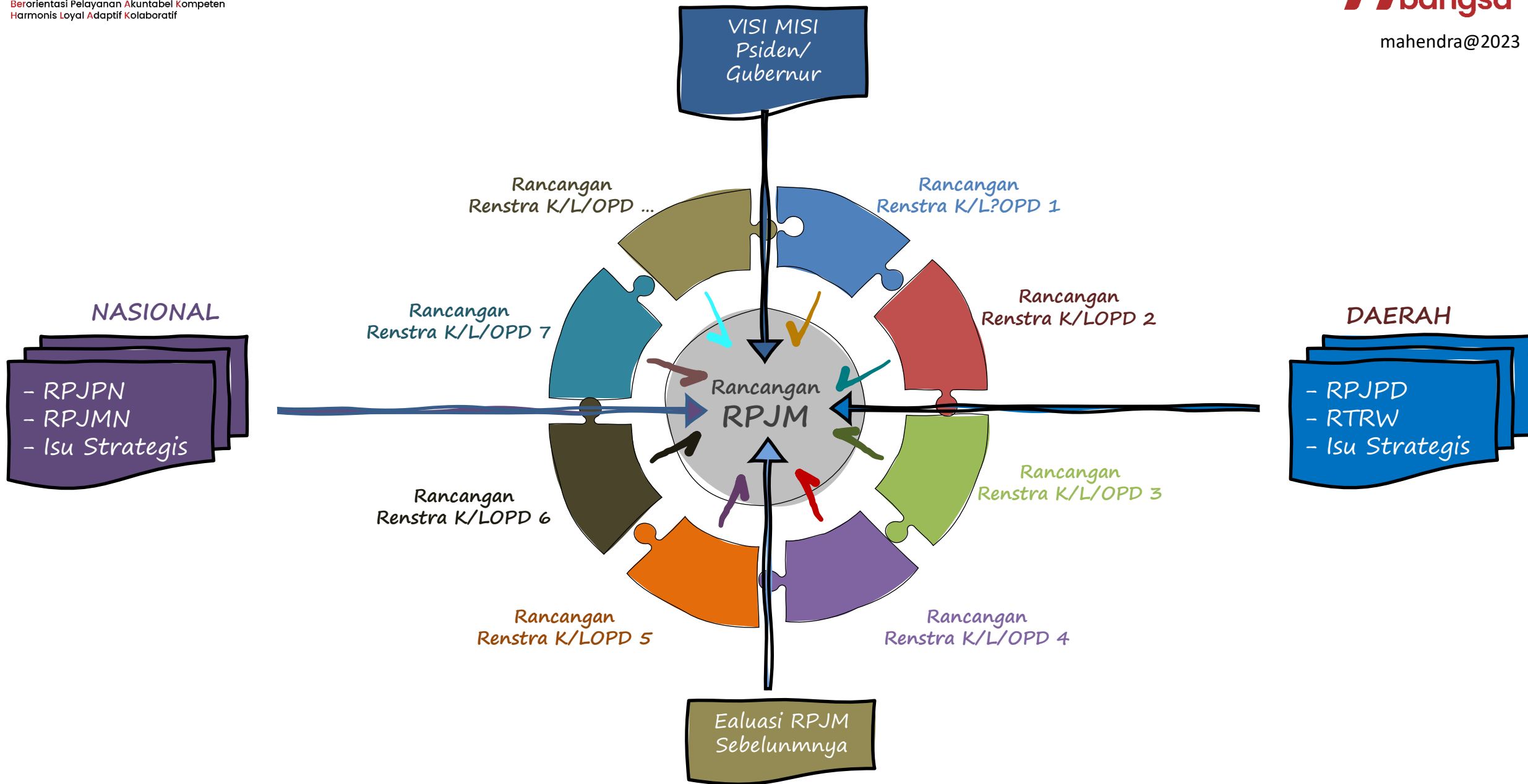
- strategi pembangunan Nasional,
- kebijakan umum,
- program KL dan lintas KL,
- kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta
- kerangka ekonomi makro termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan **kerangka pendanaan yang bersifat indikatif**.

DAERAH

Merupakan penjabaran dari **visi, misi, dan program Kepala Daerah**, berpedoman pada **RPJP Daerah** serta memperhatikan **RPJM Nasional**, memuat

- arah kebijakan keuangan Daerah,
- strategi pembangunan Daerah,
- kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan
- program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan **kerangka pendanaan yang bersifat indikatif**.

Proses Penyusunan RPJM



RENCANA STRATEGIS

UU 25/2004

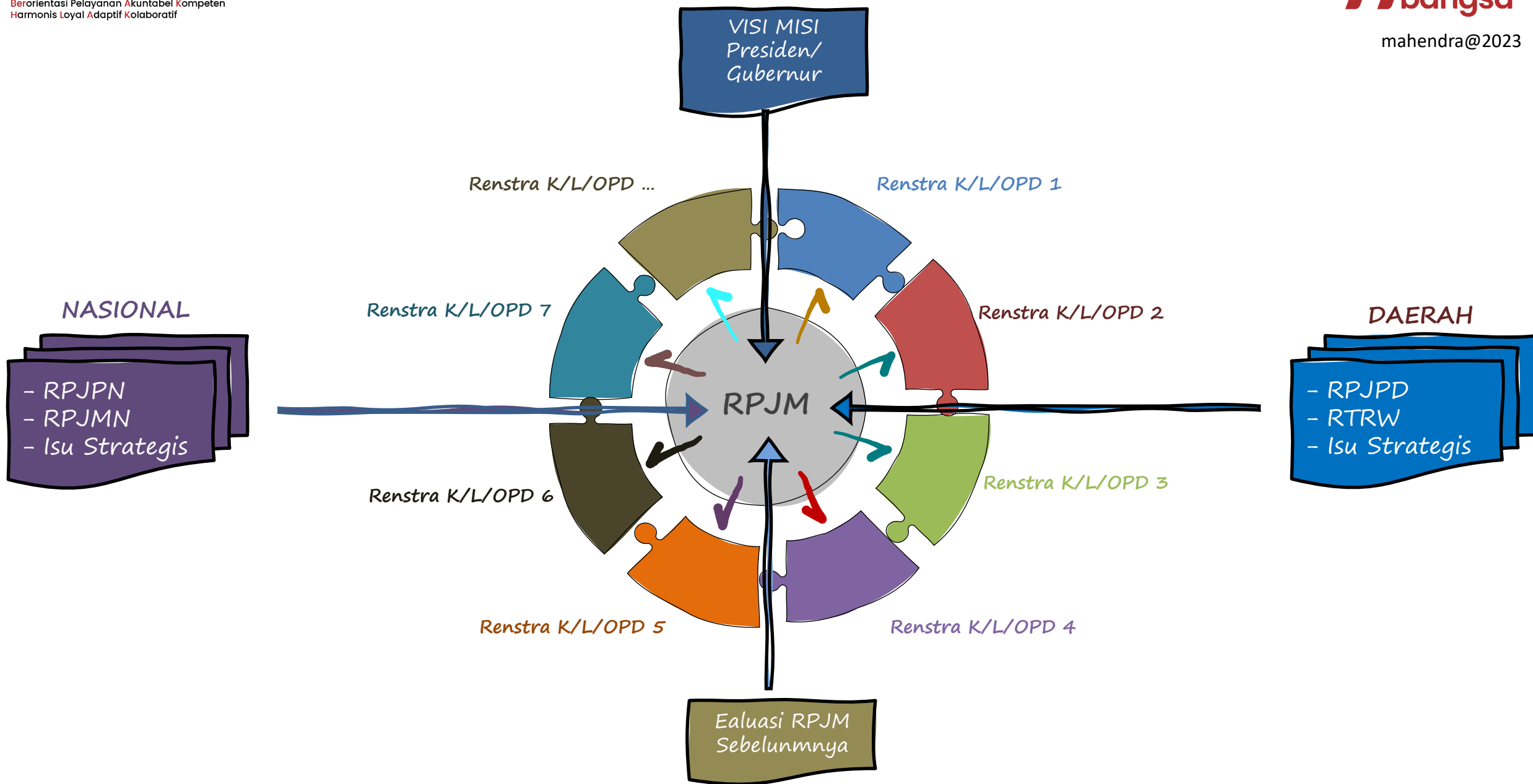
NASIONAL

Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

DAERAH

Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Proses Penyusunan RPJMD



RENCANA KERJA PEMERINTAH UU 25/2004



Penjabaran dari RPJMN, memuat:

- prioritas pembangunan,
- rancangan kerangka ekonomi makro secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal,
- program K/L, lintas K/L, kewilayahan dan kerangka \uparrow Pendanaan yang bersifat indikatif

Renja K/L \rightarrow RKA KL

APBN



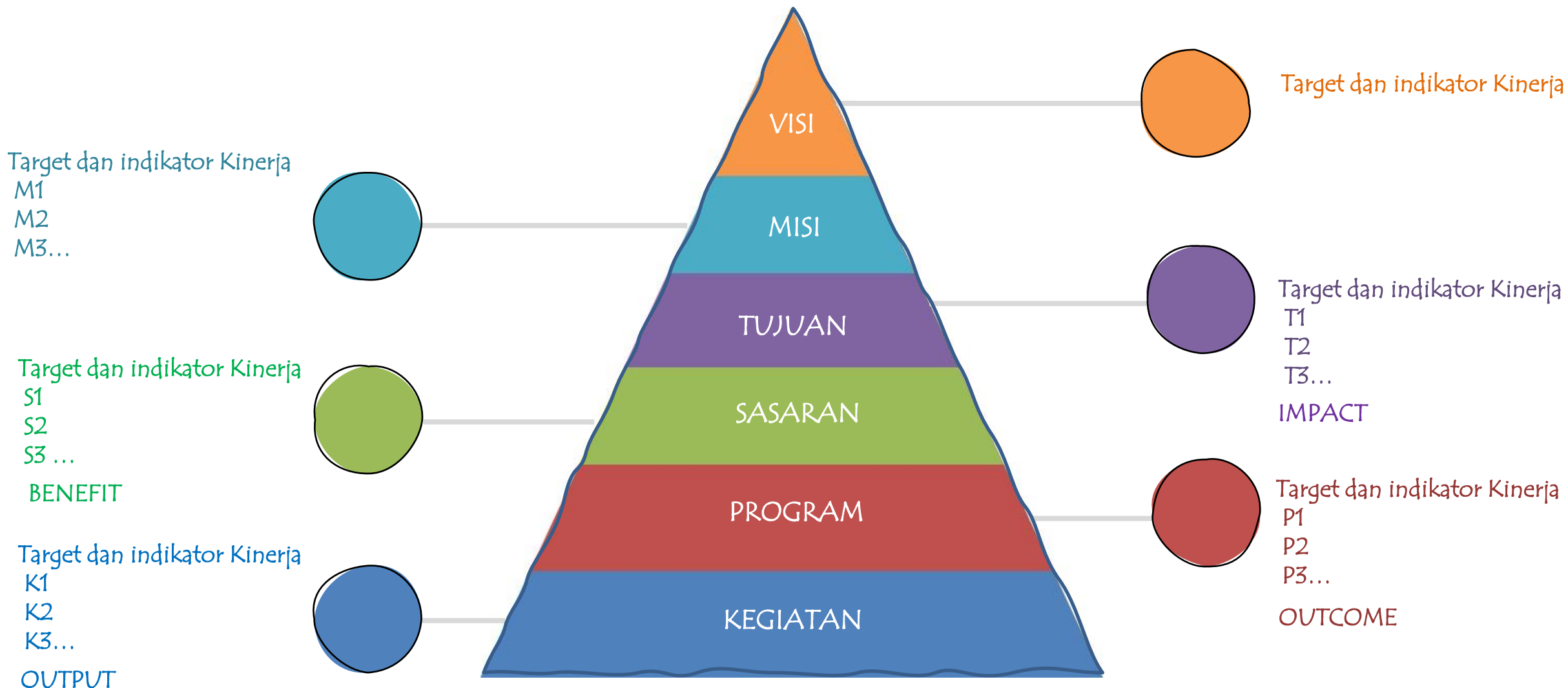
Penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat

- rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
- pembangunan Daerah,
- rencana kerja, dan pendanaannya.

Renja SKPD \rightarrow RKA SKPD

APBD

Hirarki Target Kinerja RPJM



PENYUSUNAN RKA

01

Penyusunan RKA-K/L yang mengacu pada Renja dan RKP merupakan bagian dari penyusunan Rancangan APBN

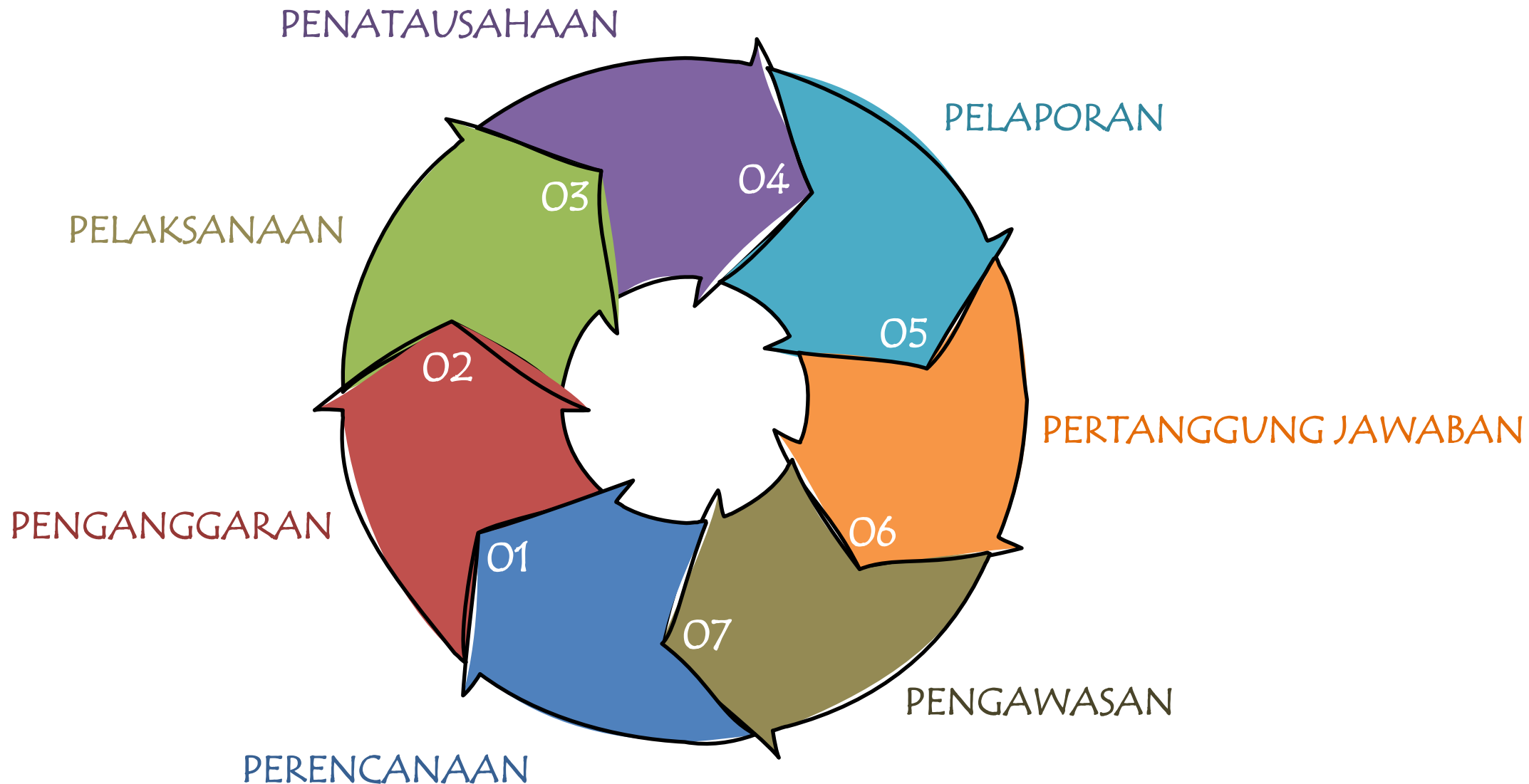
02

Disusun oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran

03

Dilakukan berdasarkan Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

PENGELOLAAN KEUANGAN



APBN

APBD



Apa yang dimaksud
dengan APBN dan APBD..?



Pengertian APBN dan APBD



- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

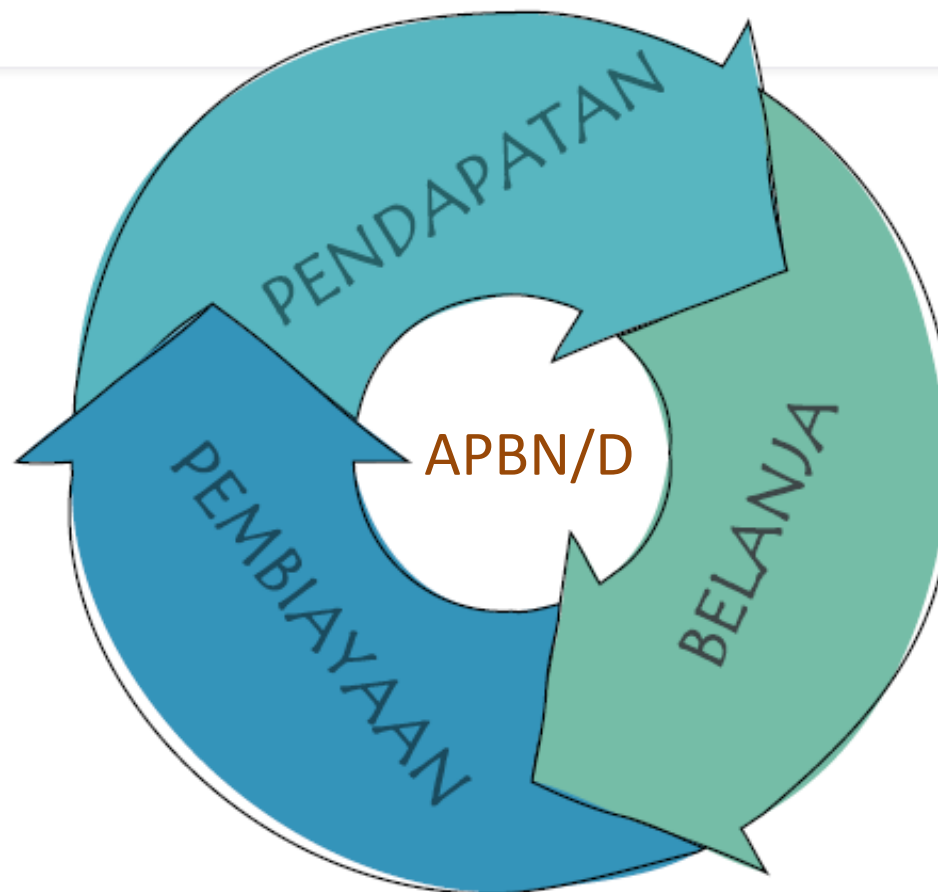
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD.



- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan UU.
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Struktur APBN dan APBD



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Kebijakan Umum APBD –
Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA PPAS)
Paling lambat disampaikan ke DPRD
Minggu 2 Juli

TAPD



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
untuk pedoman penetapan
Rencana Kerja (Renja) SKPD
Ditetapkan paling lambat
akhir Juni

BAPPEDA



MUSRENBANG

Kelurahan → Januari
Kecamatan → Februari
Kota/Kabupaten → Maret
Provinsi → April

Banggar DPRD



Kebijakan Umum APBD –
Prioritas Plafon Anggaran
(KUA PPA)
Disepakati Gubernur dan DPRD
Minggu 2 Agustus

TAPD



Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA)
Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD)

Gubernur



Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
(APBD)
disampaikan ke DPRD
paling lambat
Minggu 2 September

DPRD



Rancangan APBD dibahas
DPRD dan ditetapkan
paling lambat
akhir November

Gubernur



Raperda APBD
Disampaikan ke Kemendagri
untuk dievaluasi dan
disampaikan kembali ke
Gubernur selambatnya
Pertengahan Desember

Mendagri



Raperda APBD
Diperbaiki oleh Gubernur
dan DPRD untuk ditetapkan
menjadi Perda APBD paling
lambat
akhir Desember

SKPD



APBD
Dilaksanakan

Dievaluasi



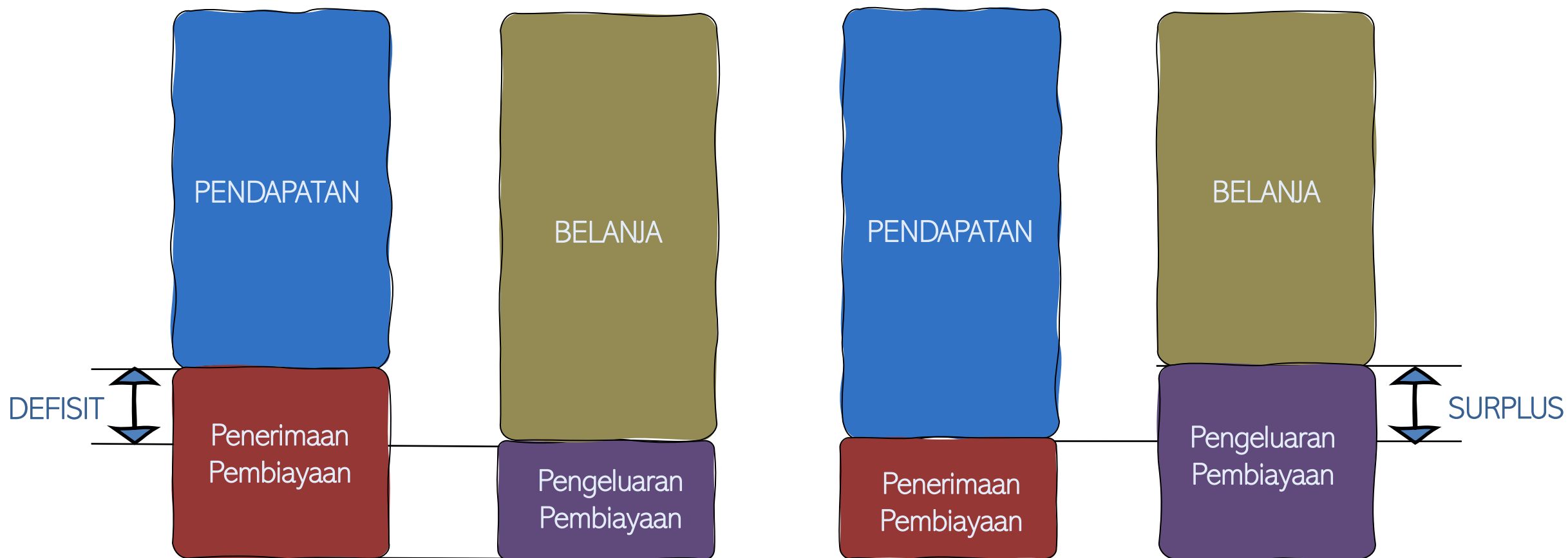
Referensi



Siklus Penyusunan APBD

Prepared by mahendra2023

Logika APBN/D



$$\text{APBN/D} = \text{PENDAPATAN} + \text{Penerimaan Pembiayaan} = \text{BELANJA} + \text{Pengeluaran Pembiayaan}$$

PENDAPATAN



1. Penerimaan Dalam Negeri
 - P Perpajakan 2021,2 T
 - PNBP 441,4 T
2. Hibah 0,41

- Utang 669,3 T
- Pinjaman 5,3 T
- Lainnya 72,8 T

$$\begin{aligned} \text{PENDAPATAN} &= 2.463,0 \text{ T} \\ \text{PENERIMAAN} &= 774,4 \text{ T} \\ \text{APBN} &= 3.237,4 \text{ T} \end{aligned}$$

BELANJA



- Belanja Pemerintah Pusat 2.246,4 T
- Transfer ke Daerah 814,7 M

- Investasi 176,0 T
- Penjaminan 0,3 T



DEFISIT
598,2 T

$$\begin{aligned} \text{BELANJA} &= 3.061,1 \text{ T} \\ \text{PENGELUARAN} &= 176,3 \text{ T} \\ \text{APBN} &= 3.237,5 \text{ T} \end{aligned}$$

EVALUASI PERKEMBANGAN INDIKATOR DAERAH



Pertumbuhan PDRB
(2022)



5,94%



Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (2022)



63,08%



Inflasi (2022)



4,21%



Indeks GINI (2022)



0,423



Tingkat Kemiskinan
(2022)



4,69%



PDRP Per Kapita
(2022)



45.958.200

Juta



Indeks Pembangunan
Manusia (2022)



81,65



Pengangguran



377.294

Orang

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH

83,781 T



PENERIMAAN DAERAH

Pendapatan Daerah

74,380 T

Pendapatan Asli Daerah 52,773 T

Pendapatan Transfer 18,457 T

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 3,149 T

Penerimaan Pembiayaan Daerah

9,400 T

SilPA Tahun Sebelumnya 7,977 T

Penerimaan Pinjaman Daerah 1,422 T

JUMLAH PENGELUARAN DAERAH

83,781 T



PENGELUARAN DAERAH

Belanja Daerah

74,613 T

Belanja Operasi 59,649 T

Belanja Modal 13,703 T

Belanja Tidak Terduga 904 M

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

9,167 T

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7,209 T

Pembayaran Pokok Utang 1,782 T

Pemberian Pinjaman Daerah 176 M

POSTUR APBD 2023

ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

PAJAK DAERAH

43,600 T

- Perubahan Peraturan Daerah Ketentuan Umum Pajak Daerah terhadap transaksi online.
- Perubahan tarif melalui perubahan Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak.
- Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah.
- Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar



PENDAPATAN TRANSFER

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

18,45 T

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Pendapatan Transfer yang telah ditetapkan berdasarkan Perpres tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



RETRIBUSI DAERAH

600 M

- Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik
- Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah
- Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan Retribusi Daerah yang masih menggunakan karcis
- Kebijakan penghapusan beberapa jenis Retribusi Daerah oleh Pemerintah, seperti: Retribusi izin Undang Undang gangguan, Retribusi pengukuran dan pengujian hasil hutan dan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi



LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

PENDAPATAN HIBAH

3,14 T

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah ditentukan dalam NPPH, koordinasi dengan pemerintah, pihak ketiga dan Perangkat Daerah terkait MoU penarikan atau pencairan, penggunaan dan pelaporan, Kelompok Masyarakat dalam Negeri atau Perorangan dalam Negeri terkait uang pemasukan dari Rekomendasi HGB/HPL dan lembaga atau Organisasi Swasta Dalam Negeri khususnya dana hibah dari PT. Jasa Raharja



HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN

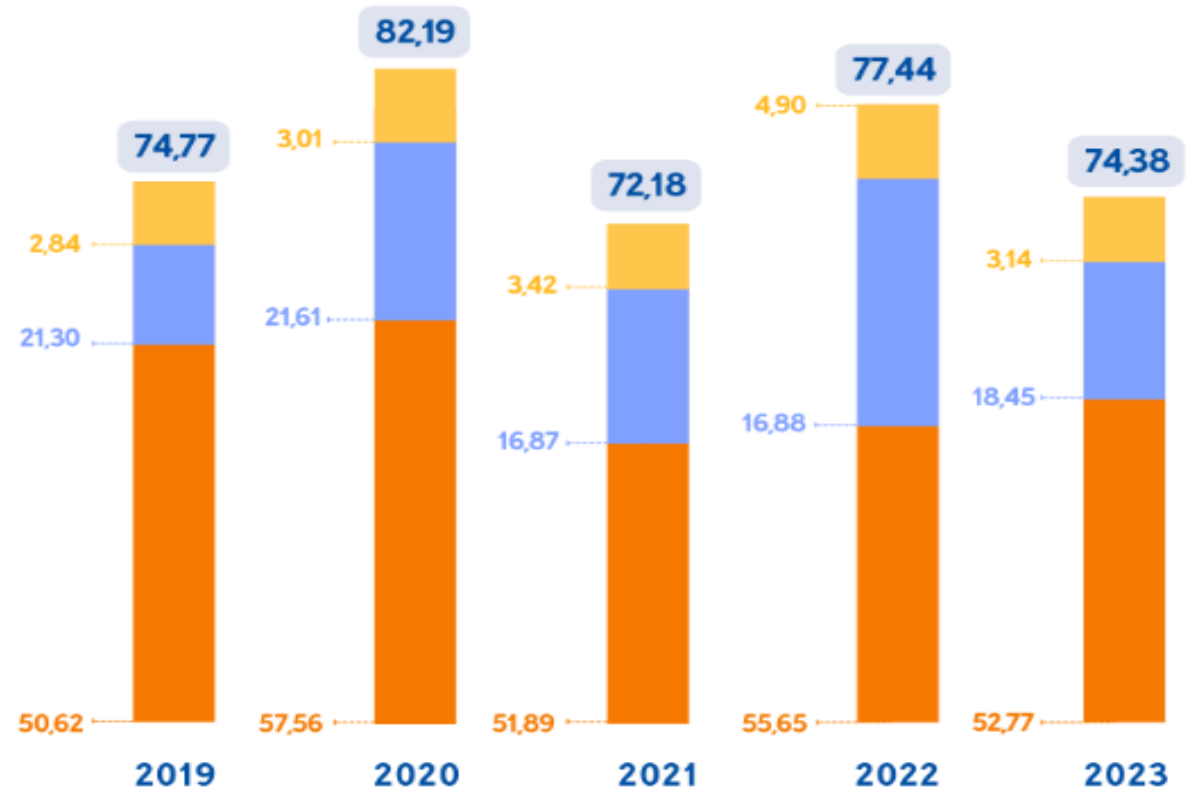
542 M

- Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis pada BUMD guna meningkatkan laba/profit BUMD
- Penerapan strategi bisnis yang tepat, serta peningkatan sinergisitas antar BUMD guna mengoptimalkan daya saing perusahaan



RINCIAN PENDAPATAN

(DALAM TRILIUN RUPIAH)



Pendapatan Asli Daerah



Pendapatan Transfer



Lain-lain Pendapatan yang Sah



SILPA 7,97 T

Diprioritaskan dalam pengalokasian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 dan SiLPA BLUD.

PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH 1,42 T

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dari Pemerintah Pusat terkait Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH



PENYERTAAN MODAL DAERAH (PMD) 7,20 T

Diarahkan untuk Penyertaan Modal/Investasi Daerah (PMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PT Patungan.

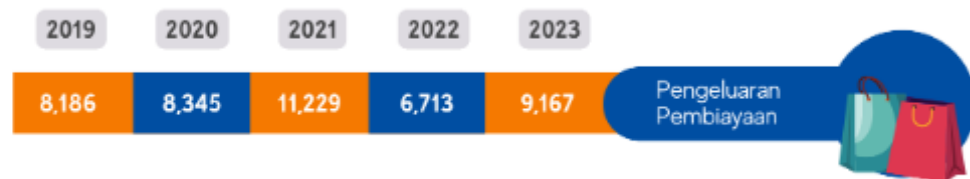
PEMBAYARAN POKOK UTANG 1,78 T

Diberikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang Daerah yang Jatuh Tempo.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

RINCIAN PEMBIAYAAN

(DALAM TRILIUN RUPIAH)



PENERIMAAN PEMBIAYAAN

9,400 T

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 7,977 T. Penerimaan Pinjaman Daerah 1,422 T

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

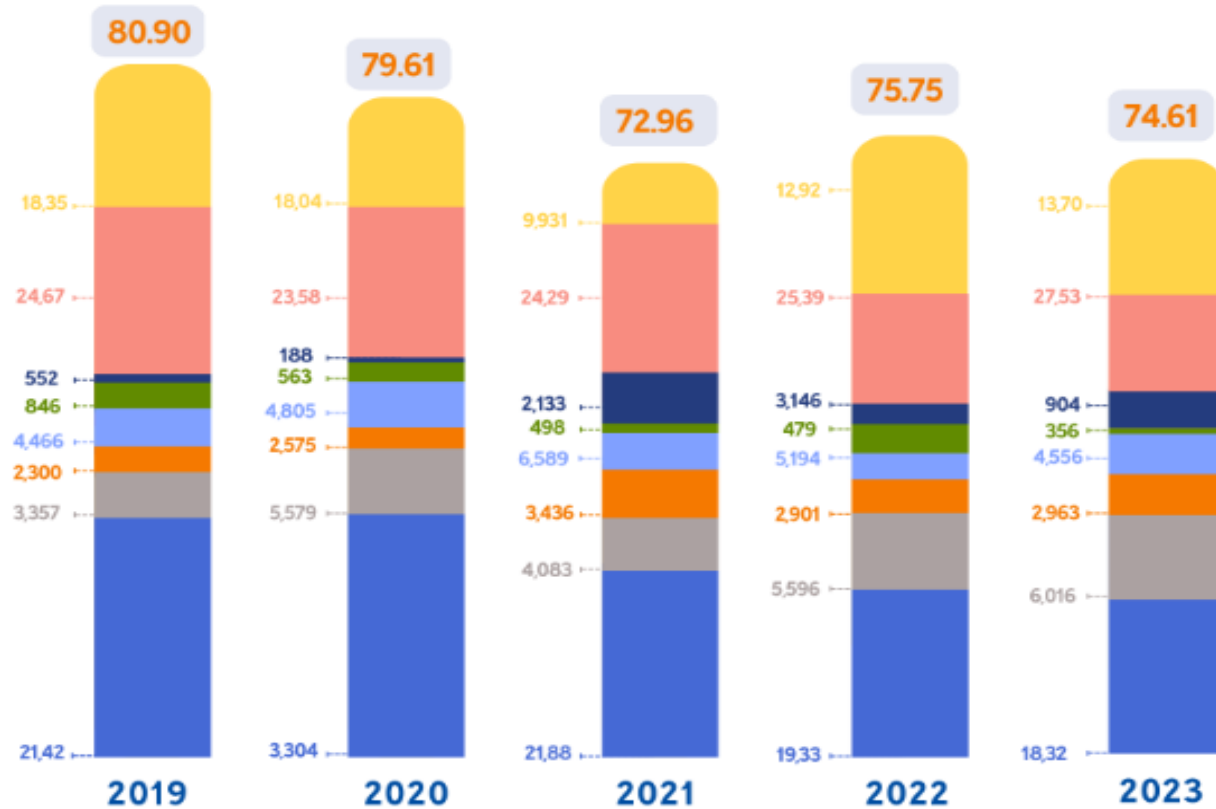
9,167 T

Penyertaan Modal Daerah 7,209 T
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo 1,782 T
Pemberian Pinjaman Daerah 176 M



RINCIAN BELANJA

(DALAM TRILIUN RUPIAH)



- Belanja Pegawai
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Bantuan Keuangan
- Belanja tidak terduga
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Hibah
- Belanja Modal

PRIORITAS PEMPROV DKI JAKARTA



Penanganan Banjir

10,794 T

Penanganan Kemacetan

14,277 T



Antisipasi Dampak Resesi Ekonomi

10,042 T

Perlindungan Sosial

9.218 T



Penanggulangan Stunting

157 M

URUSAN PENDIDIKAN



KJP
3,093 T



KJMU
323 M



Kegiatan BLUD
53 M



Rehab Sekolah dan
Fasilitas Pendidikan
814 M

URUSAN PENDIDIKAN



Asessment Peserta
Didik Berkebutuhan
Khusus
2,067 M



BOP APBD SD, SMP,
SMK, SLB, PAUD,
Kesetaraan
1,7 T



PMTAS
43 M



Sertifikasi SMK
25 M

URUSAN KESEHATAN



Penyediaan Alat Kesehatan

388 M

Pembangunan fasilitas kesehatan

234 M



Pemeliharaan fasilitas kesehatan

3,279 M

Jamkesjak (BPJS)

1,669 T



URUSAN KESEHATAN



BLUD
(Operasional)

4,510 T

Penanganan
COVID-19

320 M



Penyediaan Makanan
Tambahan (PMT)

114,521 T



URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Pembangunan dan peningkatan jalan-jalan strategis di Provinsi DKI Jakarta
356 M



Penanganan Banjir
3,25 T

Pengelolaan sampah
2,56 T



URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Transformasi Digital
Jakarta Smart City
39 M



Pengendalian Banjir
Berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi
21 M



URUSAN PERHUBUNGAN



Evaluasi dan Optimalisasi
Lajur Sepeda

7,5 M



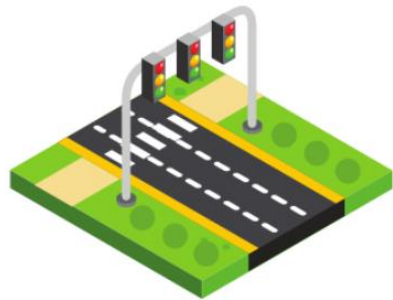
Subsidi Transjakarta

3,9 T



Subsidi MRT

650 M



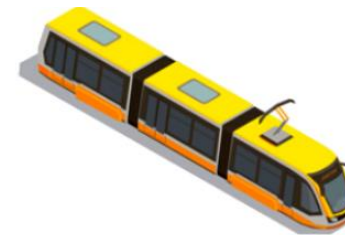
Pengembangan dan
Peningkatan ITS Traffic light

150 M



Peningkatan Fasilitas
Pelabuhan

106 M



Subsidi LRT

350 M

URUSAN PERHUBUNGAN



Pengadaan Lahan Untuk
Pembangunan LRT

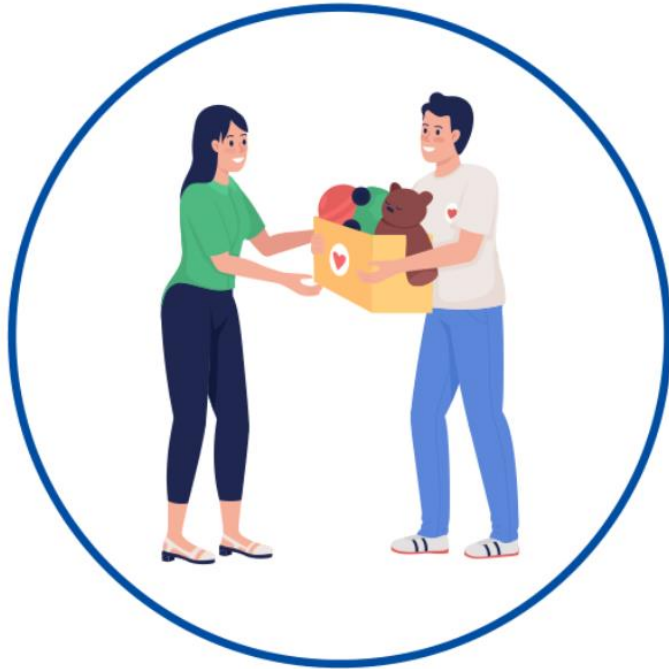
40 M



Revitalisasi Pelabuhan

279 M

URUSAN SOSIAL



Bantuan Sosial

951 M



Penanggulangan Bencana

35 M



URUSAN SOSIAL



Penyediaan Alat
Bantu Penunjang Fisik

9,2 M



URUSAN TENAGA KERJA

Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri
Rp19 M



Pelatihan Satuan Pengamanan
Rp2,9 M



Pelatihan Peningkatan Produktivitas bagi UMKM
Rp649 juta



Pelatihan SIM A
Rp13 M



Pameran Bursa Kerja (Job Fair)
Rp3,8 M



Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan dan MTU
Rp93 M

URUSAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UMKM

Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)

28 M



Program pengembangan Ekspor

7,5 M



Program perencanaan dan pembangunan industri

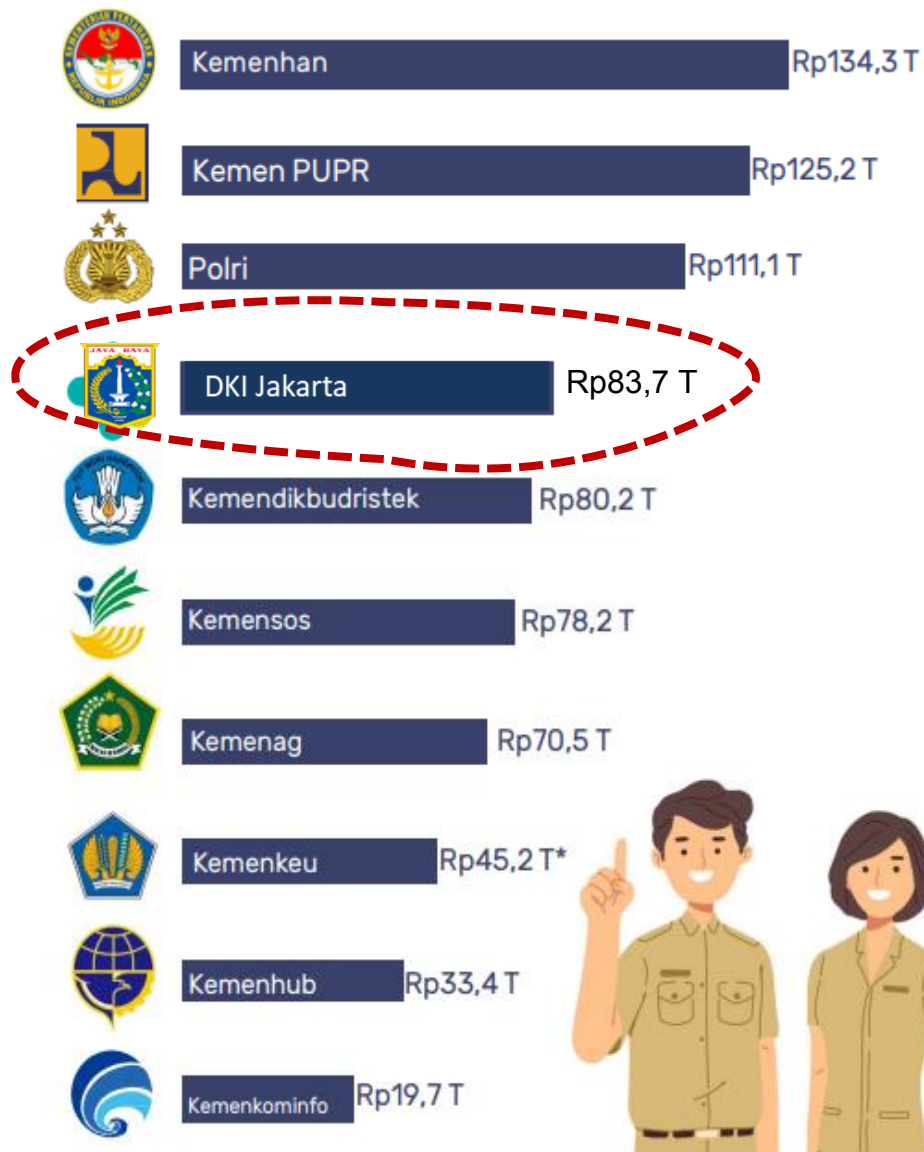
128 M



Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

45 M

10 KEMENTERIAN/LEMBAGA dengan pagu terbesar





Prepared by @mahendra2023

TERIMA KASIH